

Bahas TPKSDA, Perhutani Madura Terima Kunjungan UPT. PSDA WS Madura Bawean di Pamekasan

Octavia Ramadhani - BEKASI.WARTAWAN.ORG

Feb 13, 2026 - 12:59



Madura (12/2/2026) - Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Madura menyatakan dukungannya terhadap kelestarian lingkungan dengan berpartisipasi aktif kembali dalam keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Madura Bawean pada diskusi yang digelar di Kantor Perhutani KPH Madura. Kamis, (12/02/2026).

Administratur Perhutani KPH Madura Bima Andrayuwana melalui Kepala Seksi Produksi & Ekowisata Marinus mengatakan bahwa, Hari ini kami menerima kunjungan kerja dari UPT. PSDA WS Madura Bawean dalam rangka membahas terkait tindaklanjut keanggotaan TKPSDA dari unsur Non Pemerintah pada periode 2026 s.d 2031. "Pada dasarnya, Perhutani sangat mendukung program pemerintah tersebut dan siap berkolaborasi bersama seluruh stakeholder terkait," katanya.

"Marinus menjelaskan bahwa, [Perhutani](#) KPH Madura pada periode sebelumnya telah berperan aktif, namun saat ini telah memasuki periode baru sehingga perlu ada pendataan kembali sebagai anggota TPKSDA sesuai regulasi dan mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.2 tahun 2024, tentang Pedoman Pembentukan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Wilayah.

"Menurut Marinus, dengan keterlibatannya, Perhutani berharap pengelolaan sumber daya air dapat berjalan maksimal demi ketahanan pangan dan lingkungan. Peran strategis Perhutani tidak hanya sebagai pengelola hasil hutan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya air demi kepentingan masyarakat luas," imbuhnya.

Sementara itu, Tim UPT. PSDA, Agil P mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Perhutani melalui keanggotaan TKPSDA. Kolaborasi ini sangat krusial untuk menjaga kelestarian fungsi hidrologis hutan, mengendalikan erosi, serta menjamin ketersediaan air tanah yang berkelanjutan, sejalan dengan program konservasi sumber daya air dan rehabilitasi lahan yang sedang kami jalankan.

"Ia menyampaikan bahwa diperlukan kolaborasi kuat antara Perhutani, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk mengatasi penurunan kualitas air serta potensi pendangkalan sungai," tutupnya. @Red.